PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Merapi Hari: Sabtu Tanggal: 07 Januari 2012 Halaman: 4

BERBENTUK BLUD

Walikota Tindaklanjuti Jamkesta

YOGYA (MERAPI) - Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti akan menindaklanjuti amanat Perda Nomor 10 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Semesta (Jamkesta) yang belum bisa terlaksana tahun ini.

Menurutnya teknis adanya Pusat Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) untuk Jamkesta tidak perlu dipersoalkan, sepanjang tidak mengganggu jaminan layanan kesehatan warga.

"Sepanjang tidak mengganggu layanan penjaminan kesehatan yang ada sekarang, tidak perlu ada kekhawatiran. Saya kira masalah kelembagaan ini (Jamkesta) tidak perlu dipersoalkan. Tapi kami akan menindaklanjutinya dengan Dinas Kesehatan," ujar Haryadi, Jumat (6/1).

Namun pihaknya belum bisa memberikan detail tindak lanjut yang dilakukan Pemkot terkait belum terlaksananya Jamkesta. Untuk masalah teknis, lanjutnya, akan diserahkan kepada Dinas Kesehatan diminta untuk mempersiapkan kelengkapan pelaksanaan Jamkesta.

Terkait surat dari DPRD yang meminta kejelasan belum terlaksananya Perda Nomor 10 tahun 2010, dia belum . menerima. "Saya belum terima surat dari dewan. Tapi saya tahu dari media dan Dinkes yang detailnya akan menindaklanjutinya," imbuhnya.

Kepala Dinkes Kota Yogyakarta, Tuty Setyowati mengaku, sudah melakukan proses panjang membentuk BLUD, tapi terkendala mekanisme yang PPK BLUD yang belum siap. "Mengingat, BLUD masih sangat baru dan belum ada rujukan kami dengan tim teknis akan mengundang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai narasumber untuk konsultasi," kata Tuty.

Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DIY Condro Imantoro sudah berkomunikasi dengan Dinkes Kota Yogyakarta dalam bimbingan teknis kesiapan memiliki PPK BLUD.

Sebelumnya Ketua Komisi D DPRD Kota Yogyakarta Sujanarko akan mengirimkan surat ke Pemkot Yogyakarta untuk mempertanyakan kejelasan pelaksanaan Perda Nomor 10 tahun 2010 terkait Jamkesta yang belum diberlakukan. **(Tri)-a**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Organisasi 2. Dinas Kesehatan 3. UPT. Jamkesda	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 13 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005